

Tantangan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar

Friska Ria Sitorus ^{a,1,*}, Fitri Ratnawati ^{b,2}

^{a,b} Universitas Prima Indonesia Jl. Sampul No.3, Kota Medan, Sumatera Utara 20118, Indonesia

¹ friskariasitorus@unprimdn.ac.id; ² fitriaratnawati@guru.sd.belajar.id;

* Corresponding Author

Received

Revised

Acceted

ABSTRAK

Perubahan kurikulum merupakan suatu keniscayaan, perubahan kurikulum dimaknai dengan pengembangan kurikulum memang harus dilaksanakan karena merupakan tuntutan jaman. Namun dalam pelaksanaannya perubahan kurikulum, dari kurikulum 2006 (KTSP) ke kurikulum 2013 mengalami permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah penerapan Kurikulum Merdeka yang dihadapi sekolah, pengajar dan siswa. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah pengajar kelas IV dan kepala sekolah. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sering bergantinya regulasi dan revisi peraturan yang berulang, belum meratanya pelatihan pada pengajar, belum lengkapnya sarana dan prasarana, buku pegangan untuk pengajar dan buku pegangan siswa, perubahan budaya ilmiah, gerakan literasi sekolah dan supervisi inside belum optimal; (2) Permasalahan yang dihadapi siswa yaitu siswa kebanyakan dari keluarga menengah ke bawah dengan dukungan belajar dari orang tua yang kurang. Siswa terbiasa pasif mendengarkan penjelasan guru, butuh waktu untuk menjadi aktif mencari dan mempelajari materi. Buku pegangan siswa jumlahnya masih kurang dan buku sumber belajar lainnya jumlahnya masih terbatas, menjadikan proses KBM kurang bisa ideal.

The Challenges of Implementing the Independent Curriculum in Elementary Schools

ABSTRACT

Curriculum change is a necessity that is interpreted as curriculum development and must be implemented since it is demand of the times. However, in implementing the curriculum changes, before the 2006 curriculum to the 2013 curriculum, there were problems faced. This research aims to examine the problems of implementing the Independent Curriculum faced by schools, teachers, and students. The data were collected through the fourth-grade teachers and the school principal. This research site is at SD Negeri 2 Pilot Blangkejeren. Data collection techniques use interviews and observation. This research figures out, firstly, frequent changes in regulations and repeated revisions of regulations, uneven training for teachers, incomplete facilities and infrastructure, handbooks for teachers and students handbooks, changes in scientific culture, school literacy movements, and internal supervision are not yet completed, optimal. Secondly, most students are from middle-class families background who have less learning support from their parents. Besides, in the learning process conducted in the teacher center learning students are passive.



KATA KUNCI

Tantangan
Kurikulum Merdeka
Sekolah Dasar

KEYWORDS

Challenges
Independent Curriculum
Elementary School



This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

1. Pendahuluan

Kurikulum merupakan suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Menurut Unruh (1984), Kurikulum adalah suatu rencana untuk keberhasilan pembelajaran yang didalamnya mencakup rencana yang berhubungan dengan tujuan, dengan apa yang harus dipelajari, dan dengan hasil dari pembelajaran. Sedangkan Inlow (1966) Kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang khusus oleh pihak sekolah guna



belaindika@nusaputra.ac.id

membimbing murid untuk memperoleh hasil dari pembelajaran yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu Kurikulum mempunyai peran penting bagi seorang individu dalam bidang pendidikan karena kurikulum harus mampu dijadikan sebagai pedoman ketercapaian pendidikan. Kurikulum memiliki berbagai tujuan, salah satu tujuan utama dari kurikulum itu sendiri adalah untuk membantu peserta didik dalam mempersiapkan masa depannya agar mampu menjadi pribadi yang memiliki kecakapan yang tinggi, memiliki daya nalar yang tinggi serta cara berpikir yang kritis dan kreatif untuk diterapkan nantinya dalam lingkungan masyarakat.

Konsep kurikulum terus berkembang dan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia kurikulum yang diterapkan yaitu Kurikulum 2013. Dalam penerapan Kurikulum 2013, yang dimana setiap mata pelajaran meliputi tiga kompetensi, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Sebagaimana diketahui, Kurikulum Merdeka diluncurkan Mendikbudristek pada Februari 2022 lalu sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pelajar. Kurikulum merdeka merupakan suatu program yang sangat sejalan dengan motivation peningkatan mutu pendidikan yang sejatinya selalu ditegaskan sejak bangsa Indonesia merdeka. Menurut Mendikbud, program ini akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Mendikbudristek No 7 Tahun 2021 tentang standar isi pada ruang lingkup materi jenjang sekolah dasar mengacu pada rumusan ruanglingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan, pada jenjang pendidikan dasar yang difokuskan dengan kesiapan peserta didik dalam beriman, bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai – nilai Pancasila, dan menumbuhkan kompetensi literasi, numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut [1].

Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri dengan pedoman penerapan Kurikulum Merdeka yang tertuang pada Permendikbudristek No 56 Tahun 2020, pada pedoman penerapan Kurikulum Merdeka ini khususnya di Sekolah Dasar terdapat beberapa faktor utama yaitu : (1). Struktur Kurikulum dengan pembelajaran intrakulikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. (2). Capaian pembelajaran, yakni kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai fase yang sudah di bagikan, untuk sekolah dasar CP disusun untuk setiap mata pelajaran. (3). Pembelajaran dan asesmen merupakan proses peserta didik dalam Pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 4). Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yakni melaksanakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk mengutkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. 5). Perangkat pembelajaran, dalam hal ini pendidik dapat menentukan bahan pembelajaran dalam upaya mencapai perofil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. (6). Kurikulum operasional satuan Pendidikan mengacu pada struktur Kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. (7). Mekanisme Implementasi Kurikulum Merdeka, dalam pengimplementasian Kurikulum Merdeka ada tiga opsi sebagai berikut : a. Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti Kurikulum satuan Pendidikan. b. Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. c. Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat perangkat pembelajaran oleh satuan Pendidikan. 8). Evaluasi Kurikulum pada satuan Pendidikan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, dalam evaluasi Kurikulum pada satuan Pendidikan merupakan kegiatan terencana dan tersistematis dalam mengumpulkan informasi dan mengelola informasi serta informasi yang substansi hal ini bertujuan untuk menguji efektivitas, efesiensi, relevansidan kelayakan rancangan Kurikulum (Kebudayaan). Pembelajaran Kurikulum Merdeka merupakan proses terwujudnya capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, agar capaian pembelajaran tersebut terwujud secara maksimal maka perlu diterapkan manajemen pembelajaran Kurikulum Merdeka yang tepat. Manajemen pembelajaran Kurikulum Merdeka di SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren telah direncanakan sedemikian rupa oleh musyawarah pengajar mata pelajaran tingkat sekolah terutama untuk kelas IV sekolah dasar. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis termotivasi melakukan penelitian dengan

tujuan mendeskripsikan (1). Perencanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka di SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren pada Kelas IV; (2). Pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka di SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren pada kelas IV; (3) Evaluasi pembelajaran Kurikulum Merdeka di SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren pada kelas IV, agar memperoleh gambaran tantangan dalam penerapan Kurikulum Merdeka. Penelitian ini kami lakukan karena kurikulum merdeka belajar merupakan kurikulum yang harus dipelajari dan dipahami oleh semua pendidik yang berkecimpung langsung dengan dunia pendidikan untuk menjadikan generasi emas yang berakhlak, berkarakter, cerdas dan berbudaya.

2. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren yang berada di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang tantangan kurikulum merdeka kelas IV Di SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren. Dalam penelitian ini akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk mengumpulkan dan memperoleh data dari guru kelas IV terkait dengan apa tantangan kurikulum merdeka kelas IV di SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren. Observasi dilakukan kepada bagian guru kelas, untuk memperoleh data tentang apa tantangan kurikulum merdeka kelas IV di SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren.

Instrumen dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara (kepala sekolah dan guru). Penelitian ini digunakan untuk mengolah data dan memeriksa data informasi dimulai peneliti masuk ke lapangan dan selama dilapangan sampai dengan selesai, dilapangan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian ini menguatkan beberapa hasil proses pembelajaran, bahwa Kurikulum Merdeka masih dalam proses implementasi dengan baik di SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren dengan opsi Kurikulum Mandiri Belajar. Hal tersebut ditunjukkan dengan fakta bahwa hanya melaksanakan beberapa bagian dari Kurikulum Merdeka. Namun ada fakta lain menunjukkan bahwa belum semua pengajar memperoleh pelatihan, termasuk banyak pengajar mengaku belum menerapkan pembelajaran sesuai Capaian kurikulum merdeka, juga belum menerapkan penilaian kognitif untuk mengukur hasil belajar siswa-siswinya. Namundemikian kecukupan buku pelajaran untuk murid telah mencapai 100%, demikian juga buku untuk pengajar telah mencapai 100%. Hal ini karena pemerintah telah menyediakan buku dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat diunduh dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Penyediaan buku elektronik oleh pemerintah telah membantu sekolah-sekolah dalam mendapatkan buku untuk siswa dan buku untuk pengajar.

Seringkali kurikulum yang tertulis di dalam berbagai dokumen kebijakan ternyata masih sulit dipahami oleh para pengajar. Inilah yang menyebabkan terjadinya distorsi dari yang diharapkan oleh pemerintah dengan kenyataan yang ada di tingkat kelas. Artinya apa yang telah ditulis dalam dokumen kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah, belum tentu dapat dilaksanakan oleh para pengajar. Karena masing-masing pengajar memiliki persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda tentang isi dan proses kurikulum. Fokus wawancara ini untuk menjawab 5 (lima) hal, yaitu (1) kesiapan pengajar dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (2) dukungan sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka, (3) dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam implementasi Kurikulum merdeka, (4) faktor pendukung dan tantangan implementasi Kurikulum

Merdeka, dan (5) langkah langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi tantangan yang dihadapi sekolah.

Lima pertanyaan tersebut akan menjawab mengapa implementasi Kurikulum merdeka selama ini daerah belum ideal. Terutama dilihat dari sisi manajerial yang melibatkan pengajar dan berbagai komponen terkait, baik di lingkungan di dalam sekolah maupun di luar sekolah hingga ke para pemangku kepentingan dan pemerintah. Berikut di bawah ini uraian lebih lengkapnya. Secara keseluruhan bahwa kurikulum merdeka menjadi salah satu upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pelajar [2].

3.1. Kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka

Berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan, sebagian besar pengajar merasa belum siap mengimplementasikan Kurikulum merdeka dengan alasan belum memahami hakikat Kurikulum baru tersebut. Kurangnya pemahaman pengajar disebabkan karena pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, Provinsi, bahkan pemerintah di level nasional belum didesain dengan baik. Beberapa informasi menyatakan bahwa terkesan pelatihan diselenggarakan secara asal-asalan, misalnya waktu pelaksanaan pelatihan sering dipadatkan atau waktu pelatihan sampai malam hari.

Dalam praktik implementasi Kurikulum merdeka dalam membuat persiapan pembelajaran, pengajar tidak membuat RPP. Sebagian besar pengajar dalam persiapan pembelajaran berbekal materi yang ada dalam buku siswa. Melihat kondisi ini, yang perlu diperbaiki adalah mentalitas para pengajar, bukan perubahan kurikulum. Hal ini sesuai dengan kesimpulan penelitian tersebut yang menyatakan bahwa solusi yang dilakukan selama ini antara lain dengan mengikuti pelatihan, belajar dan menggali informasi dari situs atau sumber yang lebih mengetahui Kurikulum merdeka.

Informasi dari para pengajar yang lebih lengkap diperoleh oleh peneliti. Mereka mengaku bahwa pelatihan Kurikulum merdeka diberikan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip belajaryang baik, karena pelatihan dilakukan dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB (malam). Para pengajar yang mengikuti pelatihan ini merasa tidak bisa menyerap materi dengan maksimal, apalagi jika pesertanya sudah berusia lanjut. Para instruktur dari provinsi dan kabupaten banyak yang belum berpengalaman menerapkan kurikulum ini, karena mereka hanya menerima pelatihan sebelumnya saat mengikuti pelatihan tingkat nasional. Akibatnya banyak instruktur yang hanya paham dalam konsep, sehingga contoh yang diberikan tidak aplikatif. Terkait dengan materi yang belum dipahami oleh para pengajar di SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren sebagian besar menyatakan belum paham mengenai pembelajaran tematik, dan menyatakan belum paham pendekatan pembelajaran kognitif.

Sebenarnya, berdasarkan wawancara terhadap para pengajar, mereka sangat berharap agar mereka mendapatkan pendampingan setelah selesainya pelatihan. Pendampingan bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas atau instruktur kabupaten. Hal tersebut karena menurut mereka kunci keberhasilan implementasi inovasi pembelajaran bukan pada pelatihannya, melainkan padapendampingannya. Oleh karena itu, menurut mereka para kepala sekolah dan pengawas sekolah juga harus dilatih Kurikulum merdeka agar mereka juga dapat mendampingi para pengajar.

Perubahan dan pengembangan kurikulum di Indonesia dengan menerapkan Kurikulum merdeka sebenarnya menuju ke arah yang benar. Sehingga guru dituntut untuk mampu mengelola pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan juga memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk memiliki jiwa kemandirian dalam belajar [3] Karena dalam Kurikulum merdeka yang menjadi perhatian utama adalah siswa dan pengajar mendapatkan otonomi untuk membuat perencanaan pembelajaran dan melaksanakannya sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Dalam hal ini setidaknya terdapat 3 (tiga) kecenderungan umum dalam pembaruan kurikulum. Pertama, menggabungkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* untuk perencanaan kurikulum.

Kedua, memposisikan peserta didik sebagai pusat kegiatan Kurikulum Merdeka. Sebab kurikulum merdeka dapat menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, mampu belajar mandiri, kreatif dalam berkarya, dan tentunya memiliki rasa kebhinekaan yang tinggi [4]. Ketiga, memberikan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan jaman teknologi dan siswa menjadi mandiri belajar sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, peranan *stakeholder* dalam pelaksanaan pendidikan juga menjadi salah satu faktor utama dalam pencapaian keberhasilan pembelajaran [5].

3.2. Dukungan sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka

Peneliti juga memperoleh banyak informasi dari para informan di sekolah bahwa dukungan warga sekolah untuk implementasi kurikulum ini dirasa kurang, walau mereka juga menyatakan menyambut baik Kurikulum Merdeka. Rendahnya dukungan ini karena mereka belum tahu apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak dalam memberikan dukungan demi suksesnya implementasi Kurikulum ini. Oleh karena itu, menurut mereka perlu segera ditinjau kembali pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah, dan tenaga administrasi mengenai Kurikulum Merdeka.

Menurut peneliti, dalam implementasi kurikulum yang diperlukan adalah inovasi program pembelajaran. Inovasi seperti ini akan muncul jika di sekolah terdapat kepemimpinan kepala sekolah yang visioner. Kepala sekolah harus mampu menciptakan iklim kerja yang baik yang memungkinkan para pengajar bekerja dengan nyaman terutama dalam rangka mengembangkan berbagai perangkat persiapan mengajar kurikulum baru.

Kurikulum merdeka hadir sebagai solusi dalam menyempurnakan kurikulum 2013 sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih maksimal [6]. Oleh karena itu kurikulum yang akan diimplementasikan adalah kurikulum baru, maka wajar jika pengajar memerlukan waktu lebih banyak dari biasanya untuk membuat modul ajar dan media pembelajaran. Selain itu para pengajar hendaknya juga menerapkan model-model pembelajaran yang membuat siswa bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Di antaranya adalah menggunakan cara yang beragam dimana konten akan lebih ideal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. dengan metode *Peer Teaching* pada Kurikulum merdeka dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, berani dalam menjawab suatu persoalan dan dapat mengaktifkan daya pikir serta daya nalar siswa, Adapun juga metode yang digunakan *Problem Based Learning* yang di mana peserta didik akan memanfaatkan keterampilan berpikirnya, semakin besar peluang masalah untuk di selesaikan hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu persoalan secara sistematis, membantu peserta didik dalam memahami peran orang dewasa di kehidupan nyata, mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggungjawab. Hal ini juga berpatokan pada matematis siswa berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Kemampuan komunikasi matematis siswa yang belajar dengan cara yang beragam dan menggunakan metode *peer teaching* dan *problem based learning* pada materi Tema 1 tentang indahnya kebersamaan.

3.3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum Merdeka

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan, yaitu (1) penganggaran yang jelas dari pemerintah daerah untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, (2) koordinasi yang baik dari pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi dengan pemerintah pusat dalam pengadaan sarana pembelajaran dan pelatihan, perencanaan yang baik, dan (3) ketersediaan sarana pembelajaran lainnya seperti LCD dan sambungan situs. Implementasi Kurikulum Merdeka walaupun sudah berjalan dengan efektif dalam beberapa bulan ini namun tetap terdapat beberapa kendala seperti, antara lain tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar, keterbatasan referensi, akses yang dimiliki dalam pembelajaran belum merata, manajemen waktu. Walau keberadaan buku sudah cukup, namun perlu ada evaluasi lebih lanjut apakah isi

buku-buku pelajaran tersebut sudah berdimensi mendunia. Tentu, keberadaan kurikulum merdeka ini dapat menjadi tolak ukur dalam bahan evaluasi [7].

3.4. Langkah-langkah untuk mengatasi kendala implementasi Kurikulum Merdeka

Berdasarkan pada temuan penelitian tersebut, beberapa hal yang urgen dilakukan antara lain adalah perbaikan manajemen implementasi kurikulum merdeka. Sebaiknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama menetapkan target berapa sekolah yang akan mengimplementasikan dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun mendatang. Siklus implementasi Kurikulum merdeka harus di buat mulai dari penganggaran, pengadaan sarana pendidikan, pelatihan, implementasi dan pendampingan, serta evaluasi keberhasilan dan kegagalannya.

Berikutnya, pelatihan sebaiknya dilakukan secara berjenjang dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelatihan dilakukan dengan mengindahkan prinsip pembelajaran yang baik dan diberikan oleh para instruktur yang berpengalaman dalam implementasi kurikulum. Tidak sekadar memenuhi formalitas datang ke tempat pelatihan, ada pelatihan, dan pulang dengan begitu mendapat uang saku. Pelatihan pengajarpun hendaknya lebih banyak difokuskan pada pendekatan tematik untuk pengajar SD, karena hal-hal itulah yang sebagian besar dikeluhkan oleh para pengajar yang menjadi informan penelitian ini di lapangan. Pedoman penilaian untuk pengajar dalam memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa juga harus segera diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan akan diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penelitian ini secara umum menguatkan beberapa temuan penelitian terdahulu, bahwa implementasi Kurikulum Merdeka belum berjalan dengan efektif, dikarenakan beberapa hal di bawah ini. Pertama, belum semua pengajar mendapatkan pelatihan, banyak pengajar yang belum bisa menerapkan pembelajaran tematik dan saintifik, serta banyak pengajar yang belum bisa melakukan penilaian autentik. Kedua, pengajar belum memahami substansi kurikulum sehingga tidak bisa menerapkannya dengan baik. Kelemahan utama pengajar dalam pembelajaran adalah kurangnya pemahaman pendekatan tematik saintifik tanpa tes kognitif dan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Ketiga, dukungan sekolah masih rendah karena belum banyak warga sekolah yang mendapatkan pelatihan kurikulum ini. Penyebab utama rendahnya dukungan sekolah karena kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kurikulum baru ini, terutama kepala sekolah dan pengawas sekolah. Keempat, Pemerintah Daerah sudah memberikan dukungan dalam bentuk anggaran pelatihan, anggaran pendampingan, anggaran pengadaan buku, dan mengirimkan para guru-kepala sekolah pengawas sekolah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun kurang ideal hasilnya. Kelima, kurang matangnya perencanaan dalam implementasi Kurikulum merdekaini akan menjadi faktor penghambat. Koordinasi yang lemah antara berbagai jenjang pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap implementasi kurikulum juga menjadi kelemahan lain. Keenam, manajemen implementasi kurikulum harus diperbaiki mulai dari penentuan target implementasi, penganggaran, pengadaan sarana pendidikan, pelatihan, implementasi dan pendampingan, serta evaluasi keberhasilan dan kegagalannya.

Saran-saran untuk perbaikan dalam implementasi Kurikulum merdeka dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan di atas adalah sebagai berikut : Pertama, perlu adanya perencanaan yang matang mulai penentuan target, penganggaran, pengadaan sarana, pelatihan, implementasi dan pendampingan, serta evaluasi. Kedua, meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan pelatihan terhadap pengajar, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Termasuk di antaranya adalah koordinasi dalam pengadaan buku dan proses pengirimannya hingga ke sekolah-sekolah sehingga tidak mengalami keterlambatan. Tentu, kompetensi guru dalam mengelola kelas dan minat belajar menjadi tumpuan keberhasilan pembelajaran [8].

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat peneliti simpulkan beberapa hal berkaitan dengan implementasi Kurikulum merdeka di SD Negeri 2 Percontohan Blangkejeren. Dengan demikian hasil dan pembahasan dalam artikel ini berguna sebagai penguat bagi para pengambil kebijakan untuk segera mengatasi masalah implementasi Kurikulum merdeka yang betul-betul terjadi di lapangan. Penelitian ini secara umum menguatkan beberapa temuan penelitian terdahulu, bahwa implementasi Kurikulum merdeka belum berjalan dengan efektif, dikarenakan beberapa hal di bawah ini. Pertama, belum semua pengajar mendapatkan pelatihan, banyak pengajar yang belum bisa menerapkan pembelajaran tematik dan saintifik, serta banyak pengajar yang belum bisa melakukan penilaian autentik. Kedua, pengajar belum memahami substansi kurikulum sehingga tidak bisa menerapkannya dengan baik. Kelemahan utama pengajar dalam pembelajaran adalah kurangnya pemahaman pendekatan tematik saintifik tanpa tes kognitif dan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Ketiga, dukungan sekolah masih rendah karena belum banyak warga sekolah yang mendapatkan pelatihan kurikulum ini. Penyebab utama rendahnya dukungan sekolah karena kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kurikulum baru ini, terutama kepala sekolah dan pengawas sekolah. Keempat, Pemerintah Daerah sudah memberikan dukungan dalam bentuk anggaran pelatihan, anggaran pendampingan, anggaran pengadaan buku, dan mengirimkan para guru-kepala sekolah-pengawas sekolah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun kurang ideal hasilnya. Kelima, kurang matangnya perencanaan dalam implementasi Kurikulum Merdeka ini akan menjadi faktor penghambat. Koordinasi yang lemah antara berbagai jenjang pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap implementasi kurikulum juga menjadi kelemahan lain. Keenam, manajemen implementasi kurikulum harus diperbaiki mulai dari penentuan target implementasi, penganggaran, pengadaan sarana pendidikan, pelatihan, implementasi dan pendampingan, serta evaluasi keberhasilan dan kegagalannya. Di masa desentralisasi mestinya implementasi kurikulum juga dilakukan secara desentralistik. Kunci utamanya koordinasi yang baik antar berbagai jenjang pemerintahan dari pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Saran-saran untuk perbaikan dalam implementasi Kurikulum merdeka dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan di atas adalah sebagai berikut: Pertama, perlu adanya perencanaan yang matang mulai penentuan target, penganggaran, pengadaan sarana, pelatihan, implementasi dan pendampingan, serta evaluasi. Kedua, meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan pelatihan terhadap pengajar, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Termasuk di antaranya adalah koordinasi dalam pengadaan buku dan proses pengirimannya hingga ke sekolah-sekolah sehingga tidak mengalamiketerlambatan.

References

- [1] Mendikbudristek, *Standar Isi PAUD, SD, SMP*. Indonesia, 2022, pp. 1–10.
- [2] F. R. Sitorus, K. K. Waruwu, and A. Febry, "Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas," *J. Pendidik. West Sci.*, vol. 1, no. 06, pp. 328–334, 2023.
- [3] F. Hartawati and M. Karim, "Tantangan Guru Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Menengah Pertama (SMP)," *Literasi J. Ilm. Pendidik. Bahasa, Sastra Indones. dan Drh.*, vol. 14, no. 1, pp. 185–190, 2024.
- [4] I. Sumarsih, T. Marliyani, Y. Hadiyansah, A. H. Hernawan, and P. Prihantini, "Analisis implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak sekolah dasar," *J. Basicedu*, vol. 6, no. 5, pp. 8248–8258, 2022.
- [5] O. Yansah, M. Asbari, G. M. Jamaludin, A. Marini, and M. S. Zulela, "Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Tantangan dan Peluang," *J. Inf. Syst. Manag.*, vol. 2, no. 5, pp. 48–52, 2023.
- [6] A. Angga, C. Suryana, I. Nurwahidah, A. H. Hernawan, and P. Prihantini, "Komparasi implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka di sekolah dasar Kabupaten Garut," *J. basicedu*, vol. 6, no. 4, pp. 5877–5889,

2022.

- [7] J. Warsihna *et al.*, "Tantangan dan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang SD: Sebuah Temuan Multi-Perspektif," *Kwangsan J. Teknol. Pendidik.*, vol. 11, no. 1, pp. 296–311, 2023.
- [8] A. A. Suwardi and R. R. Aliyyah, "Implementasi Kurikulum Merdeka: Strategi Guru dalam Mengelola Minat Belajar Siswa pada Sekolah Dasar," *Karimah Tauhid*, vol. 2, no. 6, pp. 2948–2965, 2023.